

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alijoyo, A., 2021, *Structured or Semi-structured Interview*, CRMS Indonesia, Bandung.
- Arief, B. N., 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta.
- Arikunto, S., 2016, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashafa, B., 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, A. C. dan Ardi F., 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronnik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Fajar, M. dan Yulianto A., 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Komisi Yudisial RI, 2017, *Problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan dan masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta.
- Muchtar, A., 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rachmand, M., 2012, *Penggunaan Informasi Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Litigasi*, Surabaya.
- Sitompul, J., 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta.
- Soekanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, Bogor, Politeia.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016, 07 September 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120).
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Pertempuran serta Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Militer Pertempuran.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

C. Skripsi, Tesis, Jurnal

- Ariadi, P. W. R., & Arifiana, I., "Penyuluhan Anti Pornografi pada Remaja di Sidoarjo", *Abdimas Siliwangi*, Volume 7, No. 1, 2024.
- Ariartha, I. N. W., "Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga",

- Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 8, No. 02, 2019.
- Asimah, D., “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*, Volume 3, No 2, 2020.
- Association of Chief Police Officers "Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence", *7 safe information security*.
- Balak, I. R., 2023, *Disparitas Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Pelengkap Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Skripsi, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Berti, L. E., 2024, *Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Perkara Hubungan Sesama Jenis (Gay)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Cahyono, A. S., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Publicana*, Volume IX, No. 1, 2016.
- Fahririn, Y. & Nika, W., "Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi yang Mengandung Pornografi Melalui Media Sosial Twitter", *Jurnal Esensi Hukum*, Volume V, No. 2, 2023.
- Faisah, T., & Siti, M., "Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat", *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Volume II, No. 3, 2024.
- Farnesty, E., Sari, F. R., Dzaky, R., Septia, R. B., Alayya, S. B., Adinda, S. M., & Khalisa, V., “Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Volume. 1 No.6, 2024.
- Felen & Fitri, N., “Urgensi Pembaharuan Acara Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik dalam Perspektif Tujuan Hukum” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Ferdinandus, A., dan Rifai, A., “Perbedaan Penafsiran Majelis Hakim Terkait Frase Muatan yang Melanggar Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bhirawa Law Journal*, Volume 5, Issue 1, 2024.
- Fitriati, I. F., & Nisep, R., "Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik pada POLDA Sumatera Barat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51, No. 4, 2022.
- Frananda, D., “Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.5, No.3, 2021.
- Hidayat, N., Septian, R. N., dan Herlambang, Y. T., “Sosial media dalam masyarakat sebagai konsep nyata determinisme teknologi”, *UPGRADE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, Volume.1, No.2, 2024.

- Hidayati, N., dan Stathany H., “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, No 2, 2021.
- Johan, W., “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume XVII No. 2 Edisi Mei, 2012.
- Khoiroh, A., dan Firmansyah, H., “Sistem Pembuktian yang Digunakan Oditur Militer dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anggota Militer”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Lubis, A. F., “Profesionalisme Oditur Militer dalam Melakukan Penuntutan”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP-OMSP (Babinkum TNI)*, 2011.
- Maskun & Setiyono, “Prosedur Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana yang Dilakkan oleh Anggota TNI AD (Studi di Subdenpom V/4-3 Pamekasan)”, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol.3, No.2, 2022.
- Nanda, D. W., 2023, *Putusan Pengadilan Militer II-10 Yogyakarta Dalam Perkara Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum yang Dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pusdiklat Mahkamah Agung RI. “Bukti Elektronik di Persidangan”. Modul. Disampaikan pada *Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu III Peradilan TUN*, 2019.
- Supriyanto, 2022, *Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rahayuningsih, T., *Peradilan Militer di Indonesia dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, *LPPM Universitas Airlangga*, Surabaya, 2002.
- US Departement of Justice, “Forensic Examination of Digital Evidence: Guide for Law Enforcement”, *National Institute of Justice*, April, 2004.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 17-K/PM II-11/AD/IV/2020
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 43-K/PM II-11/AD/XII/2021
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 4-K/PM.II-11/AD/I/2024

E. Internet

- Damanik, Darmo Indo, “Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan” 2022, <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>, diakses pada 4 Januari 2025.

- Dinas Psikologi Angkatan Darat, “8 Wajib TNI”, <https://www.dispsiad.mil.id/norma/8-wajib-tni>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025.
- Hukumonline, 2013 “Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan-lt5190a6861fe04/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2025.
- Hukumonline, 2017 “Siapa yang Berwenang Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota TNI”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-terhadap-anggota-tni-lt59dc226826865/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.
- Hukumonline, 2021 “Syarat dan Ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2025.
- Hukumonline, 2022 “Mengenal Oditur Militer di Peradilan Militer”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-militer-lt6217123b409eb/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.
- Hukumonline, 2022 “Penting Dipahami, 7 Prinsip dalam Hukum Acara Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penting-dipahami--7-prinsip-dalam-hukum-acara-pidana-lt62808b1a151b6/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.
- Hukumonline, 2023, “Chain of Custody berbasis blockchain dalam Penanganan Bukti Digital”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/chain-of-custody-berbasis-blockchain-dalam-penanganan-bukti-digital-lt64ce49bc3bf67/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.
- Hukumonline, 2024 “Masalah Alat Bukti Elektronik di Sidang Pengadilan (Bagian Pertama)”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-alat-bukti-elektro-nik-di-sidang-pengadilan-bagian-pertama-lt669889c6098b9/?page=2>, diakses pada tanggal 19 Maret 2025.
- Hukumonline, 2025 “Ini Strategi Polri, Kejagung, dan KPK Atasi Kebijakan Efisiensi Anggaran”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-strategi-polri-kejagung-dan-kpk-atasi-kebijakan-efisiensi-anggaran-lt67aca9ab7a629/?page=all>, diakses pada tanggal 7 Maret 2025.
- Humic Research Center, 2024 “Perkembangan Teknologi dan Dampaknya dalam Kehidupan Modern”, <https://humic.telkomuniversity.ac.id/id/perkembangan-teknologi-dan-dampaknya-dalam-kehidupan-modern/>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025.
- Info Cianjur, 2021, “Warga Cianjur Dibui 3 Tahun Akibat Rekam 17 Menit Hubungan Seks”, <https://infocianjur.com/warga-cianjur-dibui-3-tahun-akibat-rekam-17-menit-hubungan-seks/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.
- Jogja, Tugu, 2023, “Tren Kejahatan Siber di Yogyakarta Alami Peningkatan”, <https://kumparan.com/tugujogja/tren-kejahatan-siber-di-yogyakarta-alami-peningkatan-1zZUSIIPvat/full>, diakses pada tanggal 4 Januari 2025.
- KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)”, <https://kbbi.web.id/>,

- Kementerian Keuangan RI, 2023 “Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara” [https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-gelar-loka-karya-strategi-penyajian-alat-bukti-elektronik-di-hakordia-2024](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/laht/id/component/content/article/309-artikel/3005-efektivitas-dan-efisiensi-pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html#:~:text=Salah%20satu%20cara%20untuk%20meningkatkan,ada%2C%20serta%20meningkatkan%20efisiensi%20birokrasi, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.</p><p>Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Gelar Lokakarya Strategi Penyajian Alat Bukti Elektronik di Hakordia 2024” <a href=), diakses pada tanggal 5 Maret 2025.
- Kompas.com, 2025, “Anggaran Kemenhan dan TNI Kena Pangkas Rp26,9 Triliun, Tersisa Rp 139,2 Triliun”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/14554311/anggaran-kemenhan-dan-tni-kena-pangkas-rp-269-triliun-tersisa-rp-1392>, diakses pada 6 Maret 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018 “Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata”, [Mahkamah Agung Republik Indonesia](#), diakses pada tanggal 6 Maret 2025.
- Pengadilan Agama Cilegon, 2020 “Menggagas Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik”, <https://pa-cilegon.go.id/artikel/637-menggagas-pembaharuan-hukum-acara-perdata-dalam-pemeriksaan-alat-bukti-elektronik#ftn7>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025.
- Pengadilan Agama Unaha, 2019 “Eksistensi Dokumen Elektronik Di Persidangan Perdata”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>, diakses pada tanggal 25 Februari 2025.
- Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, “Visi dan Misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”, <https://dilmil.sinar.web.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.
- Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, “Sejarah Peradilan Militer”, <https://dilmilti3-surabaya.go.id/sejarah-peradilan-militer/>, diakses pada tanggal 20 November 2024.
- SIMHIVE Virtual Exhibition Platform, 2021, “Apa Saja Manfaat dari Konferensi Virtual” <https://blog.simhive.com/2021/12/23/apa-saja-manfaat-dari-konferensi-virtual/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.
- SIMHIVE Virtual Exhibition Platform, 2021, “Kelebihan dan Kekurangan dari Konferensi Virtual” <https://blog.simhive.com/2021/12/28/kelebihan-dan-kekurangan-dari-konferensi-virtual/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.
- Sukani, Sugiri, 2023, “Panglima TNI. TNI Sebagai Garda Terdepan Dan Benteng Terakhir NKRI”, <https://tni-au.mil.id/berita/detail/panglima->

[tni-tni-sebagai-garda-terdepan-benteng-terakhir](#), diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

Sulistiyono, Happy Tri, “Prosedur Autentifikasi Alat Bukti Elektronik Pada Pemeriksaan Persidangan” https://pn-sumedang.go.id/file_lama/PROSEDUR%20AUTENTIFIKASI%20ALAT%20BUKTI%20ELEKTRONIK%20PADA%20PEMERIKSAAN%20PERSIDANGAN.pdf, diakses pada tanggal 4 Januari 2025.

Syamsul Maarif, “Implementasi pemeriksaan alat bukti elektronik (digital evidence) dalam persidangan di pengadilan” <https://pspotoda.org/wp-content/uploads/2024/03/Implementasi-Penggunaan-Electronic-Evidence-di-Pengadilan.pdf>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.

Taqiyya, Saufa Ata, 2021, “Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/>, diakses pada tanggal 4 Januari 2025.

The Prakarsa, 2025 “Menelisik Kebijakan Efisiensi Anggaran: Langkah Te”, <https://theprakarsa.org/menelisik-kebijakan-efisiensi-anggaran-langkah-te/>, diakses pada tanggal 6 Maret 2025.

TNI AU, 2024, “Danskadik 404 Buka Pendidikan Suspa Idik Pomau Angkatan ke-11”, <https://tni-au.mil.id/berita/detail/danskadik-404-buka-pendidikan-suspa-idik-pomau-angkatan-ke-11#:~:text=Pendidikan%20Suspa%20Idik%20bertujuan%20untuk,dan%20kesegaran%20jasmani%20yang%20baik%2C>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.